

**A B S T R A K**

Pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke wilayah Indonesiakepada 169 negara yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang BVK tentu membawa implikasi pada beberapa aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang bermuatan positif maupun negatif. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas BVK ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yaitu: Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015. Salah satu aspek yang sangat dekat dengan implementasi kebijakan BVK adalah tindakan pengawasan lalu lintas orang asing, mengingat banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah NKRI dengan beragam kepentingan berpotensi mengancam dan merugikan negara karena melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan prinsip selektif, Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap orang asing yang perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah mengingat jumlah persebaran dan alur keluar dan masuk tenaga kerja asing di Indonesia.

Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada peraturan-peraturan yang menjadi dasar pemerintah dalam menyikapi banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan yang persebarannya hingga ke daerah-daerah.

Sasaran dari penyusunan tesis ini adalah upaya pengawasan orang asing hingga tingkat daerah yang bukan hanya menjadi tanggung jawab Imigrasi saja. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

**Kata kunci:***Bebas Visa Kunjungan, Imigrasi, Pengawasan Orang Asing, Koordinasi, Peraturan Daerah.*

**ABSTRACT**

The provision of a Short Visit Visa to Indonesia's territory for 169 countries as outlined in Presidential Ordinance Number 21/2016 concerning Short Visit Visa certainly has implications for several aspects in the life of the nation and state, both positively and negatively charged. Indonesian Government Policies that provide the regulation of Short Visit Visa facilities is a continuation of the previous policy, namely: Immigration Act Number 6/2011, Presidential Ordinance No. 69/2015 and Presidential Ordinance Number 104/2015. One aspect that is very close to the implementation of Short Visit Visa policy is the previous surveillance across foreigners. It is considering the large number of foreigners entering the territory of the unitary republic of Indonesia with a variety of interests potentially threatening and harming the state due to violations of law in Indonesia. To realize the selective principle, the Directorate General of Immigration carries out supervision activities for foreigners that need to be coordinated and synergized with ministries / institutions and also with local governments considering the number of foreign workers who come in and out in Indonesia.

In this thesis, the constituent focuses on the regulations that form the basis of the government in addressing the large number of foreigners who enter Indonesian territory by using the Short Visit Visa facility which spreads to the regions.

The target of the preparation of this thesis is the supervision of foreigners to the regional level which is not only the responsibility of Immigration. Hopefully this thesis can be a useful reading and add insight to its readers.

**Keywords:** *Short Visit Visa, Immigration, Supervision of Foreigners, Coordination, Regional Ordinance.*